

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Penerapan *corporate governance* di Indonesia mencuat sejak krisis ekonomi yang melanda Asia. Semakin diperlukan sejak terkuaknya skandal akuntansi yang mengguncang perusahaan-perusahaan. KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US\$ 75 ribu pada September tahun 2001. Siasatnya, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman menyusut drastis dari US\$ 3,2 juta menjadi hanya US\$ 270 ribu. Penasihat Anti Suap Baker khawatir dengan polah anak perusahaannya. Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, Undang-Undang Anti Korupsi untuk perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker memohon kepada pengadilan distrik Texas supaya kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan. Maka KPMG pun terselamatkan. (Kompas.com, 2010)

Kasus KAP (Kantor Akuntan Publik) Andersen terungkap saat perusahaan Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang

menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan. Enron memanipulasi laporan keuangan dan menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar \$ 393 juta. Perusahaan mengalami kerugian sebesar \$ 644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron pada periode tersebut. (Kompas.com, 2010)

Selanjutnya pada tahun 2009, tiga Direksi PT Waskita Karya dipecat karena bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan rekayasa laporan keuangan. Rekayasa yang dilakukan berupa manipulasi laba yang mana laba dinaikkan hingga Rp 400miliar. (Tempo.com, 2009).

Penerapan *corporate governance* yang kurang optimal juga ditunjukkan dari kasus PT Jasa Marga pada tahun 2017. Kasus tersebut muncul setelah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil mengungkap kasus penyuapan Harley Davidson oleh salah satu *General Manager* (GM) PT Jasa Marga terhadap salah satu auditor BPK. (Kontan.co.id, 2017).

Lemahnya penerapan *corporate governance* ini haruslah diselesaikan dengan cara pembenahan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peristiwa yang terjadi seperti di atas dikarenakan oleh kurang baiknya sistem *good corporate governance*. Lemahnya penerapan *corporate governance* ini haruslah diatasi sehingga tidak terulang kembali. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) juga harus menjaga

kestabilan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga tercipta aktivitas pasar modal yang jujur, transparan, aman dan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku.

Jensen dan Meckling menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan akan rentan terhadap konflik. Konflik ini merupakan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan sebagai pengelola perusahaan dan sering disebut dengan masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik ini timbul dikarenakan manajer perusahaan mungkin akan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan pemegang saham dan pengelolaan aset perusahaan yang tidak maksimal dalam menghasilkan keuntungan. Hal inilah yang mendorong untuk diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam perusahaan untuk memberi kepercayaan terhadap pemilik perusahaan.

Apabila tata kelola perusahaan yang dilakukan tidak baik, akan menimbulkan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam operasi perusahaan. Biaya tersebut disebut dengan biaya keagenan dan sangat merugikan pemilik perusahaan terutama pemilik saham minoritas. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga yaitu (1) *monitoring cost* yakni biaya pemantauan atas tindakan manajemen, (2) *bonding cost* yakni biaya untuk mengikat kepentingan manajer terhadap kepentingan pemilik, dan (3) *residual loss* yakni kerugian yang diterima pemegang saham atas keputusan manajemen yang tidak optimal.

Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar pembentukan Komite Nasional tentang Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG yang menerbitkan Pedoman GCG Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2004 KNKCG diganti menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 yang didasari pandangan luas bahwa tata kelola perusahaan yang lebih baik yang berkaitan dengan kinerja yang lebih baik. Dengan pengelolaan perusahaan yang lebih baik, akan membuat biaya keagenan menjadi berkurang.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap biaya keagenan. Yegon, *et al* (2014) meneliti tentang “*The Impact of Corporate Governance on Agency Cost : Empirical Analysis of Quoted Services Firms in Kenya*”. Adapun variabel yang dipakai adalah kepemilikan manajerial yang diukur dengan persentase kepemilikan saham manajer, kepemilikan institusional yang diukur dengan persentase kepemilikan saham institusi, kepemilikan eksternal yang diukur dengan persentase kepemilikan saham individu yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan dalam struktur manajemen, struktur remunerasi yang diukur dengan jumlah remunerasi yang diberikana terhadap manajemen perusahaan, dewan komisaris independen yang diukur dengan persentase dewan komisaris independen di dalam susunan dewan komisaris, pemisahan CEO dan pendiri perusahaan yang diukur dengan *dummy*, dengan melihat apakah CEO perusahaan tersebut merangkap

sebagai pendiri perusahaan atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan eksternal yang tinggi akan mengurangi biaya keagenan. Struktur remunerasi dan dewan komisaris independen dapat meminimumkan biaya keagenan. Pemisahan CEO dan pendiri perusahaan akan mengurangi biaya keagenan. Berdasarkan hasil ini, mekanisme tata kelola internal perusahaan memiliki sedikit efek pada mengurangi biaya keagenan.

Bameri dan Jabari (2014) meneliti tentang “*A Study on effect of ownership structure and Management Control on agency costs in Companies listed on the Tehran Stock Exchange*”, dengan tujuan untuk menyelidiki dampak kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, rasio hutang, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap biaya keagenan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran. Adapun variabel yang dipakai adalah kepemilikan manajerial yang diukur dengan persentase kepemilikan saham manajer, kepemilikan institusional yang diukur dengan persentase kepemilikan saham institusi, proporsi dewan komisaris independen diukur dengan persentase komisaris independen didalam struktur dewan komisaris, biaya hutang diukur dengan leverage dan untuk mengukur biaya keagenan adalah menghitung tingkat pemanfaatan aset oleh manajemen untuk menghasilkan keuntungan.. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya keagenan sedangkan biaya hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan.

Siddiqui *et al.* (2013) meneliti tentang "*Internal Corporate Governance Mechanisms and Agency Cost: Evidence from Large KSE Listed Firms*" yang bertujuan untuk menganalisis berbagai mekanisme tata kelola perusahaan yang mengurangi biaya keagenan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa *internal corporate governance mechanisms* yang diukur dengan menggunakan CEO *tenure* dan rapat komite audit memiliki pengaruh positif pada biaya keagenan, struktur hutang yang diukur dengan leverage tidak memengaruhi biaya keagenan, rapat dewan komisaris, *board size*, dualitas, dan *block ownership* berpengaruh negatif pada biaya keagenan yang diukur dengan *asset utilization ratio*.

Putri dan Sukartha (2016) melakukan penelitian tentang "*Pengaruh Mekanisme Corporate Governance pada Agency Cost*". Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel non-eksekutif direktur, eksekutif direktur, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kompetisi pasar tidak berpengaruh pada monitoring cost, sedangkan variabel struktur utang dan struktur remunerasi berpengaruh positif pada monitoring cost. Selain itu, variabel non-eksekutif direktur, eksekutif direktur, komite audit, kepemilikan institusional dan kompetisi pasar tidak berpengaruh pada *bonding cost*, sedangkan variabel komisaris independen, struktur utang dan struktur remunerasi berpengaruh positif pada *bonding cost*.

Hadiprajitno (2013) melakukan penelitian yang menguji *corporate governance* (karakter kepemilikan dan mekanisme *corporate governance*) terhadap biaya keagenan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi keuangan, kepemilikan pemerintah, dan

kepemilikan asing memiliki efek negatif pada biaya agensi yang diproksi dengan biaya operasi manajerial dan asset turnover yang dibandingkan dengan kepemilikan publik. Selanjutnya, konsentrasi kepemilikan minimal 5 persen tidak terbukti memberi efek pada biaya keagenan. Hasil pemeriksaan lainnya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris memiliki efek negatif terhadap biaya agensi yang diproksikan dengan *asset turnover*. Namun, kedua variabel dan jumlah pertemuan komite audit memiliki efek sebaliknya dengan biaya keagenan ketika proksi sebagai biaya operasi manajerial. Inkonsistensi ini disebabkan oleh pelaksanaan secara efektif mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia setelah mencapai 10 tahun pelaksanaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Bameri dan Jabari (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi tersebut adalah mengganti variabel biaya hutang dan proporsi dewan komisaris independen dengan variabel komite audit sebagai variabel independen sedangkan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tetap digunakan di dalam penelitian ini.

Moh'd *et al* (1998) menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu institusional dan shareholder dispersion dapat mengurangi *agency cost*. Hal ini karena kepemilikan mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung manajemen atau sebaliknya menentang manajemen.

Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih

optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dipilih sebagai variabel independen karena kepemilikan institusional dapat dinyatakan sebagai perwujudan pengawasan dari pihak luar perusahaan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial merupakan solusi dalam masalah keagenan yang dapat membantu penyatuan kepentingan antar pemegang saham dan manajer. Semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial semakin baik kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial dipilih sebagai variabel independen karena kepemilikan manajerial dapat difungsikan sebagai proses penyatuan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan perusahaan sehingga akan mengurangi potensi konflik keagenan.

Menurut Forker (1992) komite audit dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komite audit dipilih sebagai variabel independen karena komite audit dapat dinyatakan sebagai perwujudan pengawasan dari pihak dalam perusahaan. Adanya komite audit maka pengendalian terhadap laporan keuangan akan semakin baik sehingga laporan keuangan yang diumumkan akan berkualitas dan dapat dipercaya oleh pemegang saham.

Biaya keagenan diproksikan dengan *asset utilization ratio* dikarenakan proksi ini akan menunjukkan seberapa mampu dan komitmen manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan yang menguntungkan pemilik perusahaan. (Ang *et al*, 2000),.

Perbedaan variabel yang digunakan para peneliti merefleksikan beragamnya indikator mekanisme *Corporate Governance*. Selain itu, hasil yang

didapat berbeda mungkin dikarenakan perbedaan lokasi penelitian, sampel penelitian dan periode pengamatan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan ini diarahkan untuk memperluas bidang penelitian dengan mempertimbangkan sebuah model empiris yang mencoba mengaitkan antara mekanisme *corporate governance* dengan biaya keagenan. Dilatarbelakangi oleh fenomena masalah dan penelitian terdahulu maka penelitian ini akan memberikan bukti secara empiris apakah mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap biaya keagenan. Objek penelitian yang digunakan adalah sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena sektor Manufaktur merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian dan sumber penerimaan pajak yang cukup besar bagi negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Biaya Keagenan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan berpengaruh terhadap timbulnya konflik keagenan?
2. Apakah biaya keagenan berpengaruh terhadap penyelesaian konflik keagenan?
3. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap biaya keagenan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya keagenan?

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya keagenan?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap biaya keagenan?
7. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap biaya keagenan?

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini memperoleh temuan yang terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada pengujian mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit yang diterapkan dalam perusahaan sehingga mampu mengurangi konflik perusahaan yang diakibatkan oleh pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya keagenan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya keagenan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap biaya keagenan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?

4. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap biaya keagenan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:

1. Kepemilikan institusional terhadap biaya keagenan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Kepemilikan manajerial terhadap biaya keagenan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Komite audit terhadap biaya keagenan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap biaya keagenan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai biaya keagenan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan input atau masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, sehingga perusahaan dapat membantu mengevaluasi, memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan.

